

**TRANSFORMASI PERAN PUSTAKAWAN DALAM MEMBANGUN LITERASI
INFORMASI MASYARAKAT DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

Kurniawati,^{1*} Fauzan Hidayatullah²

¹Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka-Indonesia

² Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar-
Indonesia

Koresponden: kurniawatibima917@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran pustakawan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat di era digital, dengan fokus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima. Meningkatnya penetrasi internet dan derasnya arus informasi digital menuntut masyarakat memiliki kemampuan literasi informasi yang memadai agar dapat memilah, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima menjalankan empat peran utama: sebagai edukator literasi informasi, mediator informasi, promotor literasi digital, dan fasilitator program komunitas. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya kesadaran masyarakat, pustakawan telah mengembangkan berbagai strategi adaptif seperti mobile library, pelatihan literasi berbasis komunitas, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas pustakawan dan modernisasi layanan perpustakaan merupakan kunci peningkatan literasi informasi masyarakat Kabupaten Bima.

Kata-Kata Kunci: Literasi informasi; pustakawan era digital dan layanan perpustakaan

Abstract

This study examines the role of librarians in improving public information literacy in the digital era, focusing on the Bima Regency Regional Library and Archives Office. Increasing internet penetration and the rapid flow of digital information demand that the public possess adequate information literacy skills to effectively sort, evaluate, and utilize information. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis with nine purposively selected informants. The results indicate that librarians at the Bima Regency Regional Library and Archives Office perform four primary roles: information literacy educators, information mediators, digital literacy promoters, and community program facilitators. Despite facing challenges such as limited digital infrastructure and low public awareness, librarians have

developed various adaptive strategies such as mobile libraries, community-based literacy training, and cross-sector collaboration. This study concludes that strengthening librarian capacity and modernizing library services are key to improving public information literacy in Bima Regency.

Keywords: Information literacy; digital era librarians and library services

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia mengakses, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Era digital yang ditandai oleh meluasnya penggunaan internet, media sosial, dan perangkat cerdas (smart devices) menciptakan kondisi yang paradoks: di satu sisi, masyarakat kini memiliki akses terhadap informasi yang nyaris tak terbatas; di sisi lain, kelimpahan informasi ini justru melahirkan persoalan baru berupa kesulitan dalam memilah informasi yang sahih, relevan, dan terpercaya dari lautan konten yang acap kali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Zurkowski, 1974 dalam Bawden, 2001).

Kondisi ini melahirkan konsep yang dikenal sebagai information overload atau banjir informasi, di mana individu kerap mengalami kebingungan dan ketidakmampuan dalam mengelola informasi yang diterimanya secara efektif. Fenomena penyebaran berita bohong (hoaks), disinformasi, dan misinformasi yang semakin massif di ruang digital menjadi bukti nyata bahwa kemampuan literasi informasi masyarakat masih jauh dari memadai (Wardle & Derakhshan, 2017). Dalam konteks inilah, literasi informasi yang didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengenali kebutuhan informasi, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis menjadi kompetensi esensial abad ke-21 (American Library Association, 2000).

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan tersendiri dalam hal literasi informasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), meskipun penetrasi internet nasional mencapai 77,02 persen, indeks literasi digital Indonesia masih berada pada angka 3,54 dari skala 5,00 menempatkan Indonesia pada kategori "sedang" dalam hal kemampuan digital warganya. Kesenjangan literasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, antara kelompok terdidik dan yang kurang berpendidikan, serta antara generasi muda dan lanjut usia, masih menjadi persoalan struktural yang memerlukan penanganan sistematis (Kominfo, 2022).

Di tengah tantangan tersebut, perpustakaan sebagai institusi publik yang memiliki mandat historis dalam demokratisasi akses informasi dituntut untuk bertransformasi dan memainkan peran yang lebih aktif dalam membangun kapasitas literasi informasi masyarakat.

Perpustakaan bukan lagi sekadar gudang penyimpanan buku, melainkan telah berkembang menjadi pusat pembelajaran komunitas (community learning center) yang responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat yang terus berubah (Lankes, 2011). Dalam transformasi ini, pustakawan sebagai aktor utama dalam ekosistem perpustakaan menempati posisi yang sangat strategis.

Pustakawan modern dituntut untuk melampaui peran tradisionalnya sebagai penjaga koleksi (custodian of collection) dan beralih menjadi pemandu informasi (information navigator), pendidik literasi (literacy educator), dan agen perubahan sosial (social change agent) (Kulthau, 1993). Kompetensi pustakawan di era digital tidak lagi terbatas pada penguasaan sistem pengatalogan dan referensi, melainkan mencakup kemampuan literasi digital, pemahaman tentang sumber daya informasi elektronik, kemampuan instruksional, serta kepekaan terhadap kebutuhan komunitas yang dilayaninya (Corrall, 2012).

Kompetensi pustakawan di era digital berkembang jauh melampaui penguasaan katalog dan koleksi fisik. Ada empat kelompok kompetensi utama yang kini menjadi standar profesional pustakawan modern berikut peta lengkapnya seperti gambar 1.



Gambar 1. Kompetensi Pustakawan

Kompetensi digital Ini adalah fondasi yang paling berubah dari peran tradisional. Pustakawan kini harus mampu mengelola sistem otomatisasi perpustakaan (OPAC, SIMPus),

memahami struktur metadata dan standar seperti Dublin Core atau MARC 21, mengelola repositori digital, serta memiliki literasi data dasar untuk menganalisis tren penggunaan koleksi. Kemampuan kurasi konten digital memilih, mengorganisir, dan merawat sumber daya elektronik juga termasuk di sini.

Kompetensi layanan merupakan pustakawan modern tidak menunggu pemustaka datang; mereka aktif menjemput. Kompetensi ini mencakup layanan referensi digital (chat, email, media sosial), kemampuan melakukan wawancara referensi (reference interview) untuk menggali kebutuhan informasi yang sesungguhnya, serta keterampilan interpersonal yang kuat untuk melayani beragam kelompok pengguna dari pelajar hingga lansia, dari peneliti hingga pelaku UMKM.

Kompetensi pedagogis/instruksional yakni pustakawan dari sekadar "penjaga koleksi." Pustakawan era digital adalah pendidik literasi. Mereka perlu mampu merancang dan menyampaikan program pelatihan literasi informasi, menggunakan pendekatan andragogi untuk orang dewasa, serta mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan. Kemampuan berbicara di depan publik dan memfasilitasi diskusi kelompok juga termasuk kompetensi yang esensial.

Kompetensi manajerial yaitu pustakawan berperan sebagai pengelola sumber daya dan pembuat kebijakan. Ini mencakup manajemen koleksi (seleksi, pengadaan, penyiangan), penyusunan anggaran, perencanaan program, pemahaman tentang hak cipta dan lisensi konten digital, serta kemampuan berkolaborasi lintas lembaga untuk membangun ekosistem literasi yang lebih luas.

Kabupaten Bima sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik demografis dan geografis yang khas. Dengan luas wilayah sekitar 4.389 km² dan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan, Kabupaten Bima menghadapi tantangan dalam pemerataan akses layanan publik, termasuk layanan perpustakaan (BPS Kabupaten Bima, 2025). Kondisi geografis yang berbukit-bukit dengan banyak desa terpencil, ditambah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, menjadikan upaya peningkatan literasi informasi sebagai pekerjaan yang membutuhkan pendekatan yang tidak konvensional.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan layanan perpustakaan di wilayah tersebut berupaya menjalankan fungsinya dalam mendorong

peningkatan budaya baca dan literasi informasi masyarakat. Namun demikian, berbagai keterbatasan—mulai dari sumber daya manusia yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai, hingga rendahnya minat kunjung masyarakat ke perpustakaan menjadi hambatan nyata yang harus dihadapi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran pustakawan dalam meningkatkan literasi informasi, namun sebagian besar berfokus pada perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan di kota besar (Rader, 2002; Secker & Coonan, 2011; Muin, 2014). Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya merupakan kajian yang berakar dari konteks perpustakaan perguruan tinggi di negara maju, di mana infrastruktur digital sudah mapan dan komunitas penggunanya adalah civitas akademika yang relatif melek teknologi. Sementara itu, Muin (2014) meskipun berasal dari konteks Indonesia, tetap berfokus pada lingkungan perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya lebih memadai dibandingkan perpustakaan daerah. Ketiga penelitian tersebut menghasilkan temuan tentang peran instruksional pustakawan dalam mendukung literasi informasi pada komunitas terdidik dan urban, sehingga rekomendasinya pun cenderung berorientasi pada pengembangan kurikulum literasi di lingkungan akademik.

Berbeda dengan itu, penelitian Kabupaten Bima menempatkan dirinya pada konteks perpustakaan daerah (public library) yang melayani masyarakat umum dengan latar belakang pendidikan yang sangat beragam, di wilayah yang menghadapi keterbatasan geografis, infrastruktur digital yang belum merata, serta ketimpangan akses informasi yang cukup signifikan. Fokusnya bukan sekadar pada peran instruksional pustakawan, melainkan pada transformasi peran itu sendiri yakni bagaimana pustakawan daerah beradaptasi secara aktif di tengah tekanan era digital dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Ini menjadikan penelitian ini lebih bernuansa sosial dan kontekstual, bukan sekadar teknis-pedagogis.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan peran pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat; (2) mengidentifikasi program dan strategi yang telah diterapkan; (3) menganalisis tantangan yang dihadapi pustakawan dalam menjalankan perannya; dan (4) merumuskan rekomendasi pengembangan kapasitas pustakawan dan layanan perpustakaan dalam konteks era digital. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu perpustakaan, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemangku kebijakan dalam merancang program literasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study research design). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks yakni peran pustakawan dalam meningkatkan literasi informasi dalam konteks alamiah dan spesifik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima (Creswell, 2014). Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi mendalam terhadap suatu kasus tunggal yang dibatasi oleh waktu dan tempat, menggunakan berbagai sumber bukti (Yin, 2018).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima, yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai bulan Februari 2026. Subjek Penelitian dan Teknik Sampling. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi, pengetahuan mendalam tentang fenomena yang diteliti, dan ketersediaan (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang yang terdiri atas: (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima (1 orang); (2) Pustakawan fungsional (4 orang); (3) Staf layanan teknis (2 orang); dan (4) Pemustaka/pengguna layanan perpustakaan (2 orang). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Teknik Pengumpulan Data.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan dengan panduan wawancara semi-terstruktur yang telah divalidasi oleh dua orang pakar ilmu perpustakaan. Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas layanan perpustakaan, interaksi pustakawan dengan pemustaka, dan pelaksanaan program literasi. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap laporan tahunan, data statistik pengunjung, dokumen program kegiatan, dan kebijakan internal lembaga.

Teknik Analisis Data.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi empat tahapan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), penarikan simpulan (conclusion drawing), dan verifikasi (verification). Proses pengkodean dilakukan secara open coding, axial coding, dan selective coding untuk

mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan. Keabsahan Data. Keabsahan penelitian diuji melalui empat kriteria: kredibilitas (melalui member checking dan triangulasi), transferabilitas (melalui deskripsi rinci), dependabilitas (melalui audit trail), dan konfirmabilitas (melalui reflektivitas peneliti). Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari komite etik penelitian institusi, dan seluruh informan telah menandatangani lembar persetujuan (informed consent) sebelum berpartisipasi.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima

Aspek	Keterangan
Nama Lembaga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima
Tahun Berdiri	1978 (awalnya bagian dari Kantor Perpustakaan Daerah)
Status	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bima
Jumlah Pustakawan	9 orang (3 pustakawan fungsional, 6 tenaga teknis)
Jumlah Koleksi	± 28.450 eksemplar (termasuk koleksi digital 1.200 judul)
Luas Gedung	1.200 m ² (2 lantai)
Jam Layanan	Senin–Jumat 08.00–16.00 WITA; Sabtu 08.00–13.00 WITA
Anggota Terdaftar	4.872 orang (per februari 2026)
Rata-rata Kunjungan	87 orang/hari (meningkat 23% dari tahun sebelumnya)
Program Unggulan	Mobile Library, Bima Membaca, Literasi Digital Desa
Koneksi Internet	Tersedia (bandwidth 50 Mbps, Wi-Fi publik 2 titik akses)
Layanan Digital	OPAC online, e-book, database e-journal (terbatas)
Indikator	Nilai
Total Koleksi (eksemplar)	28.450
Anggota Terdaftar	4.872
Rata-rata Kunjungan/Hari	87
Tenaga Pustakawan	9

Sumber: Dokumen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bima, 2026.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima merupakan perangkat daerah yang berperan strategis dalam pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan perpustakaan serta kearsipan di wilayah Kabupaten Bima. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1978 dan pada awalnya merupakan bagian dari Kantor Perpustakaan Daerah. Seiring dengan perkembangan tata kelola pemerintahan daerah, institusi ini kemudian ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan daerah. Dari aspek sumber daya manusia, dinas ini didukung oleh 9 tenaga pustakawan yang terdiri atas 3 pustakawan fungsional dan 6 tenaga teknis. Komposisi ini berperan dalam menjalankan layanan administrasi, teknis pengelolaan koleksi, serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Keberadaan tenaga pustakawan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan dan pengembangan koleksi perpustakaan.

Sarana dan prasarana perpustakaan tergolong memadai dengan luas gedung mencapai 1.200 m² yang terdiri atas dua lantai. Fasilitas ini dimanfaatkan untuk ruang baca, ruang koleksi, layanan sirkulasi, ruang pengolahan, serta kegiatan literasi masyarakat. Jam layanan dibuka secara rutin dari Senin hingga Jumat pukul 08.00–16.00 WITA dan Sabtu pukul 08.00–13.00 WITA, sehingga memberikan akses yang cukup luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan perpustakaan. Dalam hal koleksi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima memiliki sekitar 28.450 eksemplar bahan pustaka yang mencakup koleksi tercetak dan koleksi digital sebanyak kurang lebih 1.200 judul. Koleksi tersebut disediakan untuk mendukung kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, serta pengembangan literasi masyarakat. Hingga februari 2026, jumlah anggota perpustakaan tercatat sebanyak 4.872 orang, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 87 orang, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, dinas ini juga telah menyediakan layanan berbasis digital, antara lain OPAC online, layanan e-book, serta akses terbatas ke database e-journal. Selain itu, dukungan infrastruktur teknologi ditunjang oleh ketersediaan koneksi internet dengan bandwidth 50 Mbps dan dua titik akses Wi-Fi publik. Melalui berbagai program unggulan seperti Mobile Library, Bima Membaca, dan Literasi Digital Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima berupaya meningkatkan minat baca, pemerataan akses informasi, serta literasi digital masyarakat di wilayah Kabupaten Bima.

Pustakawan sebagai Edukator Literasi Informasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran paling menonjol yang dijalankan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima adalah sebagai edukator literasi informasi. Dalam kapasitas ini, pustakawan tidak hanya memberikan panduan teknis dalam mengakses koleksi perpustakaan, tetapi juga secara aktif menyelenggarakan berbagai program pendidikan literasi yang menjangkau beragam kelompok masyarakat.

Program "Bima Membaca" yang diluncurkan pada tahun 2021 menjadi salah satu inisiatif unggulan dalam domain ini. Program ini dirancang untuk membangun kebiasaan membaca sejak dini melalui kegiatan story-telling, diskusi buku, dan kompetisi literasi yang menjangkau siswa sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan data yang diperoleh, program ini telah menjangkau lebih dari 2.400 siswa dari 47 sekolah di Kabupaten Bima sepanjang tahun 2025.

Pustakawan juga menyelenggarakan pelatihan literasi informasi dasar (basic information literacy training) bagi kelompok dewasa, khususnya ibu rumah tangga dan petani, yang selama ini jarang menjadi sasaran program literasi formal. Pelatihan ini mencakup materi tentang cara membedakan informasi hoaks dan fakta, penggunaan mesin pencari (search engine) secara efektif, serta pemanfaatan aplikasi perpustakaan digital. Pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual dan partisipatif, menggunakan contoh-contoh informasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

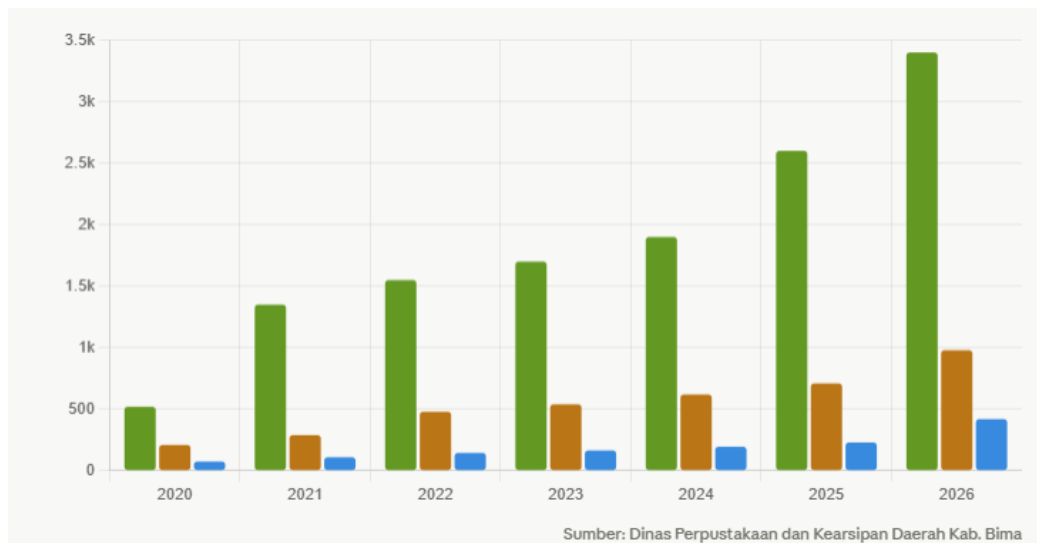
"Kami tidak bisa mengajarkan literasi informasi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di perpustakaan universitas. Masyarakat di sini perlu contoh yang dekat dengan kehidupan mereka misalnya bagaimana mengetahui apakah informasi tentang pupuk atau cuaca yang beredar di WhatsApp itu benar atau tidak." satu informan pustakawan (P-1) tanggal; 21 Januari 2026.

Pernyataan ini sejalan dengan perspektif Grassian dan Kaplowitz (2009) yang menekankan pentingnya kontekstualisasi instruksi literasi informasi agar relevan dengan kebutuhan dan pengalaman nyata kelompok sasaran. Pendekatan berbasis konteks lokal (locally contextualized approach) yang diterapkan pustakawan Kabupaten Bima merupakan adaptasi cerdas dari prinsip-prinsip literasi informasi universal ke dalam realitas sosial-budaya masyarakat setempat.

Pustakawan sebagai Mediator Informasi

Berdasarkan sumber dokumen laporan kunjungan tahun 2020-2026 ditemukan peran pustakawan sebagai mediator informasi diwujudkan melalui fungsi layanan referensi yang diperluas. Tidak sekadar menjawab pertanyaan tentang ketersediaan koleksi, pustakawan di

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima juga membantu masyarakat dalam menelusur informasi yang mereka butuhkan dari berbagai sumber baik cetak maupun digital.



Gambar 1. Kunjungan Perpustakaan

Sumber: Dokumen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bima, 2026

Kunjungan Perpustakaan (batang hijau) mengalami peningkatan paling signifikan. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan masih relatif rendah, kemudian meningkat tajam pada 2021 dan 2025, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2026 dengan jumlah kunjungan tertinggi sepanjang periode pengamatan. Hal ini mengindikasikan meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Anggota Aktif (batang cokelat) juga menunjukkan tren naik yang stabil. Jumlah anggota aktif bertambah setiap tahun, dengan lonjakan yang cukup jelas pada 2022 dan 2026. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan perpustakaan dalam mempertahankan dan memperluas basis pengguna layanan. Peserta Pelatihan Literasi (batang biru) meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dua indikator lainnya, tetap memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan paling mencolok terjadi pada tahun 2026, yang menandakan semakin intensifnya kegiatan pelatihan literasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program peningkatan kapasitas literasi. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan perkembangan positif kinerja perpustakaan dalam kurun waktu empat tahun, baik dari sisi kunjungan, keaktifan anggota, maupun pelaksanaan program literasi. Tren tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan layanan yang dijalankan semakin efektif dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.

Sebagai mediator, pustakawan juga berperan dalam menjembatani kesenjangan akses informasi antara kelompok masyarakat yang melek teknologi dan yang belum. Program pendampingan individual (one-on-one information assistance) yang disediakan memungkinkan pemustaka yang kurang familiar dengan teknologi digital untuk tetap dapat mengakses sumber informasi digital yang tersedia. Pendekatan ini mencerminkan komitmen perpustakaan terhadap prinsip inklusivitas dan keadilan akses informasi (information equity).

Pustakawan sebagai Promotor Literasi Digital

Merespons tantangan era digital, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima secara proaktif mengembangkan peran sebagai promotor literasi digital. Inisiatif ini diwujudkan melalui program "Literasi Digital Desa" yang dilaksanakan secara mobile menjangkau desa-desa yang tidak memiliki akses mudah ke perpustakaan induk. Program ini mengintegrasikan pelatihan keterampilan dasar teknologi informasi (penggunaan smartphone, media sosial yang sehat, dan transaksi digital yang aman) dengan penguatan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi konten digital. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka Digital Citizenship yang dikembangkan oleh Ribble (2015), yang menekankan pentingnya etika, keamanan, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.

Menariknya, pustakawan juga memanfaatkan platform media sosial terutama WhatsApp, Instagram, dan YouTube sebagai kanal penyebaran konten literasi kepada masyarakat yang tidak dapat hadir secara fisik di perpustakaan. Kanal WhatsApp "Pustaka Bima" yang dikelola pustakawan kini memiliki lebih dari 1.200 anggota aktif yang secara rutin menerima konten literasi, rekomendasi buku, dan informasi kegiatan perpustakaan.

Pustakawan sebagai Fasilitator Program Komunitas

Peran keempat yang teridentifikasi adalah pustakawan sebagai fasilitator program komunitas. Dalam kapasitas ini, perpustakaan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai ruang pertemuan (meeting place) yang memfasilitasi berbagai kegiatan komunitas berbasis pengetahuan dan literasi. Kolaborasi lintas sektor menjadi ciri khas pendekatan yang dikembangkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima telah menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Puskesmas, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat untuk mengintegrasikan layanan literasi informasi ke dalam program pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Pendekatan kolaboratif ini relevan dengan konsep embedded librarianship yang diartikulasikan oleh

Shumaker (2012), di mana pustakawan secara aktif masuk ke dalam komunitas yang dilayaninya

Tantangan dan Strategi Adaptif Pendekatan Analisis SWOT

Pada aspek kekuatan (Strengths) sebagai faktor internal positif, lembaga ini memiliki komitmen tinggi dari pustakawan dalam memberikan pelayanan publik. Program Mobile Library dinilai efektif karena mampu menjangkau desa-desa terpencil yang sulit mengakses layanan perpustakaan konvensional. Selain itu, koleksi fisik yang relatif lengkap dan beragam menjadi modal penting dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Jaringan kemitraan lintas sektor yang telah terbangun dengan baik serta lokasi perpustakaan yang strategis di pusat Kota Bima turut memperkuat daya dukung institusi ini.

Sementara itu, pada aspek kelemahan (Weaknesses) sebagai faktor internal negatif, jumlah pustakawan fungsional masih sangat terbatas, yakni hanya tiga orang, sehingga berdampak pada beban kerja dan pengembangan layanan. Anggaran untuk pengembangan koleksi digital tergolong minim, diikuti dengan infrastruktur teknologi informasi yang belum sepenuhnya memadai. Kompetensi digital pustakawan juga masih perlu ditingkatkan, dan hingga saat ini belum tersedia sistem evaluasi program literasi yang terstandar.

Pada aspek peluang (Opportunities) sebagai faktor eksternal positif, terdapat peningkatan penetrasi penggunaan smartphone di masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan layanan perpustakaan digital. Dukungan program literasi digital dari pemerintah pusat membuka peluang penguatan kebijakan dan pendanaan. Selain itu, potensi kemitraan dengan perguruan tinggi lokal, ketersediaan platform digital gratis seperti iPusnas dan berbagai e-resources, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoaks menjadi peluang strategis untuk memperluas peran perpustakaan. Adapun pada aspek ancaman (Threats) sebagai faktor eksternal negatif, perpustakaan menghadapi persaingan kuat dari berbagai platform hiburan digital yang lebih menarik perhatian masyarakat. Rendahnya indeks minat baca nasional, keterbatasan akses internet di wilayah terpencil, serta alokasi anggaran daerah untuk sektor perpustakaan yang masih rendah menjadi tantangan serius. Selain itu, persepsi publik yang masih memandang perpustakaan sebagai institusi konvensional juga berpotensi menghambat upaya transformasi layanan.



Gambar 3.

Analisis SWOT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima

Temuan penelitian mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi pustakawan dalam menjalankan perannya. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia—dengan hanya tiga pustakawan fungsional yang menangani layanan bagi lebih dari 500.000 penduduk, beban kerja pustakawan sangat tinggi dan tidak proporsional. Kedua, kesenjangan infrastruktur digital, di mana koneksi internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat teknologi menghambat pengembangan layanan digital. Ketiga, rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan perpustakaan, yang sebagian dipengaruhi oleh persepsi bahwa perpustakaan identik dengan kegiatan membaca buku cetak. Dalam merespons tantangan-tantangan ini, pustakawan mengembangkan berbagai strategi adaptif yang menunjukkan kreativitas dan resiliensi. Strategi utama mencakup: (1) pendekatan jemput bola melalui Mobile Library yang menjangkau 32 titik desa secara reguler; (2) pemanfaatan media sosial sebagai perpanjangan layanan perpustakaan; (3) kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama sebagai agen literasi informal; dan (4) pengembangan program literasi yang terintegrasi dengan kegiatan produktif masyarakat seperti pertanian dan usaha kecil.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memperkaya diskursus akademik tentang transformasi peran pustakawan di era digital, khususnya dalam konteks perpustakaan daerah di Indonesia. Empat peran utama yang teridentifikasi edukator, mediator, promotor, dan fasilitator mencerminkan pergeseran paradigma dari perpustakaan sebagai institusi pasif menuju lembaga yang proaktif dan berorientasi komunitas.

Peran pustakawan sebagai edukator literasi informasi yang ditemukan dalam penelitian ini bersesuaian dengan pandangan Bundy (2004) yang menyatakan bahwa perpustakaan merupakan institusi paling demokratis yang dapat menjalankan misi pendidikan literasi informasi untuk semua lapisan masyarakat. Kontekstualisasi program literasi yang dilakukan pustakawan Kabupaten Bima dengan menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan realitas keseharian masyarakat petani dan nelayan merupakan perwujudan dari prinsip andragogi yang dikemukakan Knowles (1980), di mana pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika relevan dengan pengalaman dan kebutuhan mereka.

Dalam hal peran sebagai mediator informasi, temuan penelitian ini mendukung argumen Kuhlthau (1993) tentang Information Search Process (ISP) yang menggambarkan bagaimana pustakawan yang terampil dapat membantu pemustaka menavigasi ketidakpastian dan kebingungan yang muncul selama proses pencarian informasi. Intervensi pustakawan pada titik-titik kritis dalam proses pencarian informasi seperti saat pemustaka mengalami kesulitan dalam memverifikasi kebenaran suatu informasi terbukti sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas akses informasi.

Peran pustakawan sebagai promotor literasi digital yang ditemukan dalam penelitian ini sejajar dengan konsep Library 3.0 yang dikembangkan Kwanya, Stilwell, dan Underwood (2013), yang menggambarkan perpustakaan masa depan sebagai institusi yang tidak hanya menyediakan akses terhadap pengetahuan, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pembangunan kapasitas digital masyarakat. Pemanfaatan platform media sosial oleh pustakawan Kabupaten Bima untuk menyebarkan konten literasi merupakan contoh konkret adaptasi perpustakaan terhadap perubahan perilaku informasi masyarakat.

Peran fasilitator komunitas yang dijalankan pustakawan juga relevan dengan konsep third place yang diperkenalkan Oldenburg (1989) dan kemudian diadaptasi dalam konteks perpustakaan oleh Aabø dan Audunson (2012). Perpustakaan sebagai "tempat ketiga" (bukan rumah, bukan tempat kerja) yang memfasilitasi pertemuan, dialog, dan pertukaran pengetahuan

antarwarga merupakan fungsi sosial perpustakaan yang semakin relevan di tengah gempuran individualisme digital.

Dari perspektif tantangan, keterbatasan sumber daya yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima mencerminkan persoalan struktural yang dihadapi oleh sebagian besar perpustakaan daerah di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suwarno (2016) yang menemukan bahwa alokasi anggaran untuk perpustakaan daerah di Indonesia rata-rata hanya berkisar 0,3–0,5 persen dari total APBD, jauh di bawah standar minimum yang direkomendasikan IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Namun demikian, strategi adaptif yang dikembangkan pustakawan Kabupaten Bima menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak selalu berkorelasi dengan rendahnya dampak layanan. Dengan kreativitas, komitmen, dan pendekatan berbasis komunitas, pustakawan berhasil mengembangkan program-program inovatif yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Temuan ini mendukung argumen Johnson (2012) bahwa inovasi dalam layanan perpustakaan seringkali lahir dari tekanan keterbatasan, bukan dari kemewahan sumber daya.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menganalisis peran multidimensi pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat di era digital. Empat peran utama yang teridentifikasi edukator literasi informasi, mediator informasi, promotor literasi digital, dan fasilitator program komunitas menunjukkan bahwa pustakawan telah bertransformasi secara signifikan dari peran tradisional menuju peran yang lebih aktif, responsif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan SDM, infrastruktur digital yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat perpustakaan, pustakawan Kabupaten Bima telah mengembangkan berbagai strategi adaptif yang kreatif dan berbasis konteks lokal. Program Mobile Library, Literasi Digital Desa, Bima Membaca, dan pemanfaatan media sosial sebagai kanal literasi merupakan bukti nyata inovasi layanan perpustakaan yang tumbuh dari akar tantangan.

Beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan secara signifikan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan, termasuk penambahan tenaga

pustakawan fungsional dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi. Kedua, program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional education) bagi pustakawan perlu dirancang secara sistematis, dengan fokus pada kompetensi literasi digital dan keterampilan instruksional. Ketiga, perlu dikembangkan sistem evaluasi dan monitoring program literasi yang terstandar untuk mengukur dampak dan efektivitas program secara lebih akurat. Keempat, kemitraan lintas sektor perlu diperluas dan dilembagakan melalui perjanjian kerja sama yang mengikat untuk menjamin keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Aabø, S., & Audunson, R. (2012). Use of library space and the library as place. *Library & Information Science Research*, 34(2), 138–149. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2011.06.002>
- American Library Association. (2000). Information literacy competency standards for higher education. ALA. <https://doi.org/10.1080/10691316.2000.10506141>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik telekomunikasi Indonesia 2022. BPS Indonesia. <https://doi.org/10.26714/bps.0201.2022>
- Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: A review of concepts. *Journal of Documentation*, 57(2), 218–259. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007083>
- BPS Kabupaten Bima. (2023). Kabupaten Bima dalam angka 2023. BPS Kabupaten Bima. <https://doi.org/10.26714/bps.5207.2023>
- Bundy, A. (Ed.). (2004). Australian and New Zealand information literacy framework: Principles, standards and practice (2nd ed.). Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. <https://doi.org/10.1108/S1055-364820180000026001>
- Corrall, S. (2012). Roles and responsibilities: Libraries, librarians and data. In G. Pryor (Ed.), *Managing research data* (pp. 99–138). Facet Publishing. <https://doi.org/10.29085/9781856048910.006>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Grassian, E. S., & Kaplowitz, J. R. (2009). *Information literacy instruction: Theory and practice* (2nd ed.). Neal-Schuman Publishers. <https://doi.org/10.1108/S0732-067120140000033002>
- Johnson, P. (2012). *Fundamentals of collection development and management* (3rd ed.). ALA Editions. <https://doi.org/10.1108/00220411111124070>
- Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy* (2nd ed.). Cambridge Books. <https://doi.org/10.1177/074171368003000118>
- Kuhlthau, C. C. (1993). A principle of uncertainty for information seeking. *Journal of Documentation*, 49(4), 339–355. <https://doi.org/10.1108/eb026918>

- Kwanya, T., Stilwell, C., & Underwood, P. G. (2013). Intelligent libraries and apomediators: Distinguishing between Library 3.0 and Library 2.0. *Journal of Librarianship and Information Science*, 45(3), 187–197. <https://doi.org/10.1177/0961000612441657>
- Lankes, R. D. (2011). *The atlas of new librarianship*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/8755.001.0001>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1080/10508406.2014.999604>
- Muin, M. A. (2014). Information literacy skill: Strategi penelusuran informasi online. *Al-Maktabah: Jurnal Komunikasi dan Informasi Perpustakaan*, 13(1), 75–85. <https://doi.org/10.15408/almaktabah.v13i1.1682>
- Oldenburg, R. (1989). *The great good place: Cafes, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day*. Paragon House. <https://doi.org/10.1080/10630732.2002.10606126>
- Rader, H. B. (2002). Information literacy 1973–2002: A selected literature review. *Library Trends*, 51(2), 242–259. <https://doi.org/10.2307/41673995>
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education. <https://doi.org/10.2505/9781564843647>
- Secker, J., & Coonan, E. (Eds.). (2011). *Rethinking information literacy: A practical framework for supporting learning*. Facet Publishing. <https://doi.org/10.29085/9781856048286>
- Shumaker, D. (2012). The embedded librarian: Innovative strategies for taking knowledge where it's needed. *Information Today*. <https://doi.org/10.1108/00220411311311004>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sqmh6>
- Suwarno, W. (2016). *Perpustakaan dan buku: Wacana penulisan dan penerbitan*. Ar-Ruzz Media. <https://doi.org/10.25077/jipis.v1i1.5>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3250027>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.023>